

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena sosial pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini, yang sangat menentukan adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga, dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu.

Maka dari itu dalam pembuatan laporan keuangan, sumber daya manusia dibutuhkan dalam keberlangsungan pembuatan laporan keuangan tersebut, untuk itulah diperlukan ketelitian yang sangat tinggi, juga perlunya sumber daya manusia yang handal. Badan Perancangan dan Pembangunan Nasional sebagai salah satu badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Agar dapat berjalan dengan baik menetapkan beberapa karakteristik terselenggaranya pemerintahan yang baik yang dikenal dengan *good governance*.

Akuntansi mempunyai kaitan sangat erat dengan beberapa prinsip *good governance* di atas, karena akuntansi pada hakekatnya adalah proses pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara kepada pelaporan keuangan daerah. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan semakin

membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya sistem informasi akuntansi yang using dan tidak akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

Tuntutan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintah berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah di Indonesia. Menanggapi tuntutan akan perlunya akuntabilitas publik, pemerintah Indonesia telah melakukan usaha dengan membuat peraturan-peraturan yang mendukung terselenggaranya akuntabilitas bagi pemerintah daerah. Peraturan-peraturan itu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang bagi masyarakat akuntansi PP ini dianggap sebagai tonggak sejarah karena sebelumnya sektor pemerintah belum mempunyai standar akuntansi sejak Indonesia merdeka. (Indrawati, 2010: 23) Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan itu diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggungjawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam

konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintah dapat berlangsung dengan baik. Dengan demikian sejauh mana tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui akuntabilitas pemerintah menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintah daerah.

Pengelolaan pemerintah daerah terutama dalam pelaporan keuangan harus akuntabel dan diawasi (*check and balance*) untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Semakin baik akuntabilitas suatu pemerintah daerah berarti semakin sedikit terjadinya permasalahan *information asymmetry* dan sedikit peluang terjadinya keterlambatan oleh pihak pemerintah daerah (*agent*). Dengan demikian tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan laporan keuangan.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mursyidi yang mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian tidak adanya laporan keuangan berkualitas menunjukan lemahnya akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada pencapaian program kerja. Untuk menghindari hal tersebut salah satu caranya adalah membudayakan akuntabilitas yang juga berarti membuat laporan keuangan yang berkualitas. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah

menguatnya tuntutan akuntabilitas kinerja atas lembaga-lembaga publik, baik di Pusat maupun Daerah. (Mursyidi, 2009: 59)

Selain itu beberapa penghambat yaitu belum terkoordinasinya peran “intermediasi” secara terpadu antara lembaga/instansi yang menjalankan fungsi untuk mengembangkan dan membina diantaranya masalah kualitas laporan keuangan, permasalahan yang terjadi yaitu belum diterapkannya secara penuh Standar Akuntansi Keuangan sektor publik yang baku. Sedangkan standar akuntansi tersebut sangat penting sebagai pedoman untuk pembuatan laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Dengan belum diterapkannya standar akuntansi secara penuh akan menimbulkan implikasi negative berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Meski Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi sektor publik yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) namun jika dilihat dari data pada tahun 2016 dan 2017 akuntabilitas laporan keuangan masih belum bisa mencapai target sesuai dengan yang telah ditargetkan yaitu mencapai 100%.

Tabel 1.1
Capaian Target Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2017

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Target Pencapaian					
			Melebihi Target (>100%)		Sesuai Target 100%		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	100%	Jumlah	100%	Jumlah	100%
1	Misi 1	2	0	0	1	100%	1	86,64%
2	Misi 2	4	0	0	3	100%	1	99,04%
3	Misi 3	3	0	0	1	100%	2	94,18%
4	Misi 4	2	0	0	1	100%	1	78,82%

Sumber data: LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2017.

Dilihat dari Tabel 1.1 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dan Pencapaian Target Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2017 di atas, akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dikatakan rendah karena diduga dipengaruhi oleh Laporan Keuangan yang belum tersaji dengan baik, salah satunya Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Hal ini dapat terlihat dari capaian misi-misi yang telah ditetapkan tidak sesuai target 100%, bahkan ada yang hanya mencapai 78,82% dari yang telah ditargetkan.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran
Per 31 Desember Tahun 2016 dan Tahun 2017

No.	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
1	PENDAPATAN	4.939.400.000	4.567.998.700	92,48	4.835.754.750
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.939.400.000	4.567.998.700	92,48	4.835.754.750
	Pendapatan Retribusi Daerah	4.939.400.000	4.567.998.700	92,48	4.835.754.750
2	BELANJA	39.734.187.207	32.871.755.149	82,73	30.392.115.586
	BELANJA OPERASI	32.730.112.907	25.939.990.759	79,25	20.720.651.961
	Belanja Pegawai	22.600.992.607	15.931.340.234	70,49	12.203.650.345
	Belanja Barang	10.129.120.300	10.008.650.525	98,81	8.517.001.616
	BELANJA MODAL	7.004.074.300	6.931.764.390	98,97	9.671.463.625
	Belanja Peralatan dan Mesin	3.592.796.950	3.544.262.450	98,65	4.950.788.625
	Belanja Bangunan dan Gedung	3.390.027.350	3.366.251.940	99,30	3.792.682.000
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	927.993.000
	Belanja Aset Tetap Lainnya	21.250.000	21.250.000	100	0
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.794.787.207)	(28.303.756.449)	81,34	(25.556.360.836)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(34.794.787.207)	(28.303.756.449)	81,34	(25.556.360.836)

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 2016 dan 2017 (Data diolah).

Dari Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat ada beberapa uraian jumlah anggaran yang tidak terealisasi seluruhnya (100%) yang menyebabkan efektifitas penyerapan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2017 masih rendah. Selain itu, banyaknya uraian yang tidak terealisasi seluruhnya (100%) ini menyebabkan anggaran mengalami Surplus (Defisit) atau Silpa, dalam akuntansi anggaran yang baik adalah berupa yang dianggarkan terealisasi sepenuhnya. Ini berarti akuntabilitas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung masih rendah.

Selain itu, meskipun telah terjadi peningkatan terhadap realisasi pada tahun 2017 yaitu sebesar 81,34%, tetapi hal ini belum dapat mengefesiensikan anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Masih ditemukan adanya defisit pada laporan keuangan di Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung yang terlihat adanya sisa anggaran yang terdapat pada laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung tahun anggaran 2017 tersebut.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka peneliti merasa tertarik dan terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang pentingnya Laporan Keuangan yang berdampak pada Akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, selanjutnya hasil penelitian ini peneliti tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh neraca (*balance sheet*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh laporan arus kas (*cash flow statement*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh catatan atas laporan keuangan (*notes of financial*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh laporan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh neraca (*balance sheet*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh laporan arus kas (*cash flow statement*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh catatan atas laporan keuangan (*notes of financial*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh laporan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam proses penelitian ini peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan nilai-nilai positif dalam pengembangan ilmu dan pelaksanaan pengimplementasian ilmu dengan peroses pelaksanaan kegiatan, Peneliti juga mengharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti ini diharapkan sebagai usaha untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai Administrasi Publik secara umum, khususnya mengenai Administrasi Keuangan Negara.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Hasil penelitian ini untuk salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Hasil penelitian ini, untuk mengetahui dan membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, mengenai pengaruh neraca (*balance sheet*), laporan arus kas (*cash flow statement*), catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*) terhadap akuntabilitas.

c. Untuk Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisis suatu fenomena Administrasi Publik khususnya dalam laporan keuangan dan membandingkan dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya dan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

1.5 Kerangka Pemikiran

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano (Dalam Pasolong, 2013: 7)

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa administrasi publik adalah suatu sistem yang telah dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi atau perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan terhadap implementasi kebijaksanaan pemerintah terhadap pelayanan publik demi tercapainya tujuan secara teratur bekerjasama untuk tujuan bersama pula.

Administrasi Keuangan Negara diatur dengan berbagai ketentuan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian Keuangan Negara.

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat di jadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”. (*Pasal 1 huruf 1 UU. No. 17 Tahun 2003*)

Tidak ada definisi keuangan negara yang dimuat secara tegas di dalam ketentuan UUD 1945 seperti pada Pasal 23 dalam sejarah perundang-undangan

Republik Indonesia, istilah keuangan negara pertama kali dipakai dalam UUD 1945 Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5).

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam (Sumarsono, 2010: 35)

Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, mendefinisikan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan, 2012: 10)

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu perusahaan, karena suatu aktifitas perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu menghasilkan suatu produk yang berkualitas yang mampu bersaing dipasar serta penggunaan sumber daya lainnya seperti *money*, *material*, *machine*, dan sebagainya baru dapat terlaksana apabila ada unsur manusia semua itu dikarenakan manusia merupakan faktor penting dari seluruh proses administrasi dan manajemen.

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya.

Peneliti berpendapat bahwa laporan keuangan adalah salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan untuk pemerintah (*agent*) dan untuk masyarakat (*principal*) yang harus dibuat secara terus menerus (berkala), sehingga hasil dari laporan keuangan tersebut berguna untuk semua lapisan masyarakat dalam menilai sebagai tolak ukur dari terealisasinya laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat atau dalam suatu periode tertentu. (Kasmir, 2013: 7) Selanjutnya untuk lebih menjelaskan mengenai laporan keuangan dan mengukur terealisasi atau tidak pelaksanaan laporan keuangan, ada jenis dan komponen dari laporan keuangan. Dr. Kasmir, mengemukakan lima dimensi yang dapat dijadikan tolak ukur dalam laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca (*Balance Sheet*) merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Artinya penyusunan komponen neraca harus didasarkan likuiditasnya atau komponen yang paling mudah dicairkan.

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapat dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian, tergambar juga jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal perusahaan. Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak

terjadi perubahan modal. Artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal.

4. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*)

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan konsep selama periode laporan. Laporan kas terdiri arus kas masuk (*cash in*) dan arus keluar (*cash out*) selama periode tertentu. Kas masuk terdiri uang yang masuk keperusahaan, seperti hasil penjualan atau penerimaan lainnya, sedangkan kas keluar merupakan sejumlah jumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluarnya, seperti pembayaran biaya operasional perusahaan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes of Financial Statement*)

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberikan penjelasan terlebih dulu hingga jelas. Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menafsirkannya. (Kasmir, 2013: 28)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti hanya mengambil tiga dimensi yang berkaitan dengan laporan keuangan, yaitu:

1. *Neraca (Balance Sheet)*, untuk mengukur keseimbangan ini didesain untuk mengetahui sejauh mana likuiditas dari laporan keuangan yang telah dibuat.
2. *Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)*, untuk mengetahui seberapa banyak aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang berdasarkan konsep kas selama periode laporan keuangan disajikan.
3. *Catatan atas Laporan Keuangan*, mengetahui informasi yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dalam laporan keuangan dan

dalam komponen atau nilai dalam laporan keuangan tertentu yang perlu penjelasan terlebih dahulu. (Kasmir, 2013: 28)

Berkaitan dengan akuntabilitas menurut Prof. Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu”. (Budiardjo, 2008: 33) Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balance system*).

“Menurut Kumorotomo bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.” (Kumorotomo, 2005: 2)

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berpendapat bahwa akuntabilitas adalah perbandingan antara kesadaran atas pertanggungjawaban yang dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, dan bagaimana tindakan yang harus dimiliki oleh setiap pegawai agar senantiasa menjadi lebih baik sebelumnya, dalam memanfaatkan waktu kerja, dan lain sebagainya.

Selanjutnya untuk lebih menjelaskan mengenai akuntabilitas kerja dan mengukur maksimal atau tidaknya tingkat akuntabilitas, menurut Mardiasmo mengemukakan ada lima dimensi akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga public harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dan publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. (Mardiasmo, 2009: 11)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti hanya mengambil tiga yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pegawai, yaitu:

1. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

2. Akuntabilitas Program

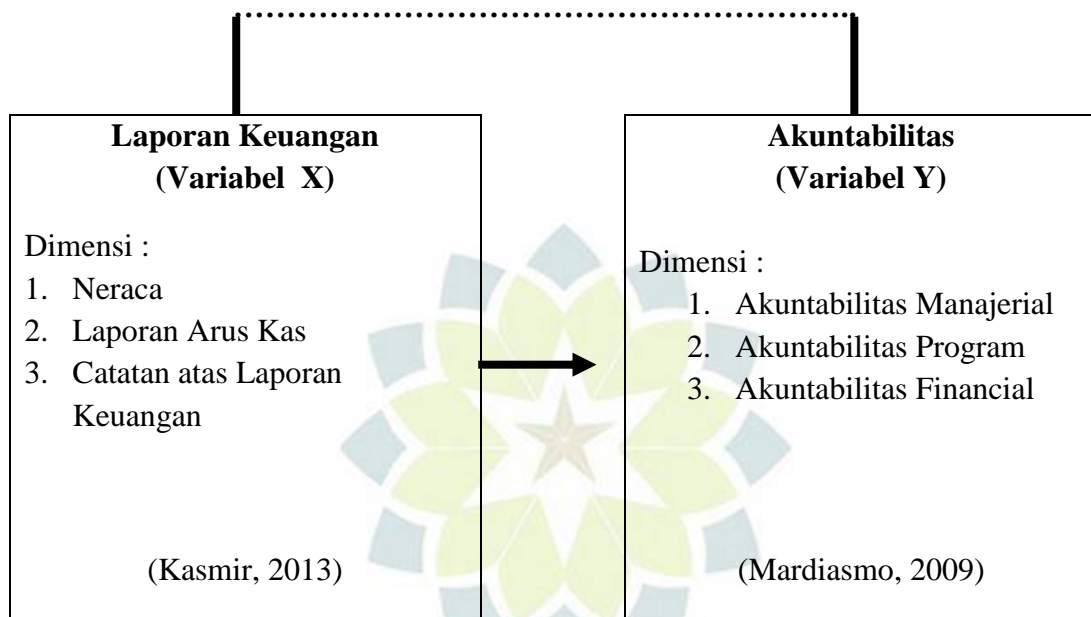
Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

3. Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dan publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. (Mardiasmo, 2009: 11)

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut maka penulis dapat menggambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Tabel 1.3
Model Kerangka Pemikiran



Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dan terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang pentingnya Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bentuk hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2013: 71)

Atas kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis asosiatif penelitian sebagai berikut :

1. H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh antara neraca (*balances sheets*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

H_a = Diduga terdapat pengaruh antara neraca (*balances sheets*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

2. H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh antara laporan arus kas (*cash flow statements*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

H_a = Diduga terdapat pengaruh antara laporan arus kas (*cash flow statements*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

3. H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh antara catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statements*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

H_a = Diduga terdapat pengaruh antara catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statements*) terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

4. H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh signifikan antara neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan terhadap akuntabilitas

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

H_a = Diduga terdapat pengaruh signifikan antara neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

